

DAFTAR PUSTAKA

- Agustaini, E. (2020). Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 137–144.
- Dulahi, D. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*, 4(6), 178–189.
- Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- H. Izudin, H. I., Syaparuddin, S., & Syamsuddin HM, S. H. (2013). Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungan dengan SilPA di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i1.1340>
- Iswahyudin. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 4(6), 152–168.
- Kementerian Keuangan. (n.d.). Apa yang dimaksud dengan SILPA. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Priyatno, Duwi. (2017). Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757. jdih.setneg.go.id.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Lembaran Negara Tahun 2005 No. 137, Tambahan Lembaran Negara No. 4575. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Tahun 2010 No. 123, Tambahan Lembaran Negara No. 5165. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 6322. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Tahun 2020 No. 1781. kemendagri.go.id.
- Republik Indonesia. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Berita Negara Tahun 2013 No. 1618. peraturan.go.id.
- Sugiyono. (2022.) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutjipto, H., Suharto, U. S., & Aprianto, R. Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pembiayaan Netto pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2017. 1–23.
- Yuliana, Arliansyah, Murhaban, & Zulkifli. (2022). Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(3), 318–330.